

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	1	9
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :

Halaman: 16

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	<input checked="" type="checkbox"/> Tabengan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tim Kementerian Pantau Langsung Pencairan DD

KUALA KURUN, PPOST

Sejumlah kementerian mengunjungi Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Kunjungan untuk melihat kenyataan di lapangan mengenai proses pencairan dana desa, baik tahap pertama maupun kedua serta kendala yang dihadapi terkait dana desa.

Sejumlah kementerian itu, yakni tim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI mengunjungi Kabupaten Gunung Mas (Gumas).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gumus, Yulius Agau mengatakan, kedatangan tim tersebut juga untuk mendorong peningkatan kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan menindaklanjuti kegiatan interkoneksi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dengan sistem keuangan desa (siskeudes), sehingga diperlukan evaluasi implementasi regulasi dan sistem terkait pengelolaan keuangan desa.

"Ada empat desa yang menjadi

sampel mereka dalam melihat proses pencairan dana desa yang berasal dari APBN, yakni Desa Panjang Tariat dan Kecamatan Pungangan di Kecamatan Turun serta Desa Sepang Kota dan Pematang Limau di Kecamatan Sepang," katanya, kemarin.

Tim, terang Yulius, melihat secara langsung yang terkait siskeudes, relugasi dan aturan dalam melakukan pencairan dana desa. Kepada tim pihaknya juga menjelaskan soal kendala yang sekarang ini sangat terasa dan dialami oleh semua kabupaten, yakni terkait dengan penetapan peraturan bupati (perbup) tentang besaran dana desa.

Di mana harus dievaluasi dulu oleh provinsi dengan waktu yang cukup lama. "Evaluasi dari provinsi tidak bisa cepat. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, karena perbup yang dievaluasi bukan hanya dari Gumus saja. Kami pun meminta agar aturan seperti itu kalau bisa lebih dipersingkat atau dipermudah lagi," jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Yulius, tim terkejut karena Gumus masih

terkendala jaringan telekomunikasi dan listrik yang hanya 60 persen desa yang menikmatinya. Padahal, untuk menerapkan siskeudes berbasis online harus menggunakan keduanya.

"Ini juga salah satu penghambatnya. Bagi desa yang belum teraliri listrik dan jaringan telekomunikasi, terpaksa harus ke ibu kota kecamatan untuk memasukkan laporan keuangan ke siskeudes. Itu pasti memerlukan biaya," katanya.

Dia pun meminta kepada pemerintah pusat agar jangan membuat aturan pada pertengahan pelaksanaan penggunaan dana desa, karena itu pastinya akan menyulitkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Sedikit saja aturan yang berubah akan menjadi masalah besar.

"Semestinya penggunaan prioritas dana desa yang sudah ditetapkan, jangan ada yang berubah di tengah jalan. SDM yang ada di desa kita berbeda dengan yang ada di pulau Jawa. SDM itu sangat menentukan dalam pengelolaan dana desa," jelas Yulius. (nth/P4)